

ANALISIS PANDANGAN NOTARIS DALAM TERAAN CAP/STEMPEL PADA MINUTA AKTA

Oleh:

Xinca Aiden Hamdani¹, Andy Omara²

INTISARI

Meningkatnya profesi Notaris di Kabupaten Sleman, juga diimbangi dengan banyak perbedaan pandangan. Salah satunya mengenai teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta, Perbedaan persepsi tersebut ialah adanya benturan ketentuan antara Undang-Undang dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007.

Jenis penelitian yang terdapat di penelitian ini ialah yuridis empiris. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya dituangkan dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian Peraturan menteri pada dasarnya hanya bisa dicabut oleh peraturan perUndang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jika adanya penggantian Undang-Undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang lama. maka Peraturan Menteri tersebut tetap berlaku. Pembubuhan teraan cap/stempel minuta akta sebagai produk akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang dimana akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan akta dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang dan permenkumham. Urgensi teraan cap/stempel jabatan pada akta Notaris menandakan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap akta tersebut terkait dengan jabatannya dalam hal ini ialah Notaris dalam hal membuat dan menandatangani serta membubuhkan teraan cap/ stempel jabatannya. Setiap akta Notaris baik dalam bentuk minuta akta, salinan akta, kutipan akta maupun grosse akta harus dibubuhi teraan cap/stempel Notaris, sebab urgensi cap/stempel Notaris pada suatu akta Notaris ialah untuk menguatkan dan menegaskan tandatangan Notaris di dalam suatu akta. Pembubuhan teraan cap/ stempel Notaris pada suatu akta Notaris dilakukan untuk menandakan bahwa Notaris bertindak atas nama jabatannya bukan atas nama pribadi.

Kata Kunci: Teraan Cap stempel, Jabatan Notaris, minuta akta,

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ANALYSIS OF NOTARY'S VIEW ON STAMP ON DEED MINUTES

By:

Xinca Aiden Hamdani³, Andy Omara⁴

ABSTRACT

The increase in the Notary profession in Sleman Regency is also balanced with many different views. One of them is regarding the marking of the Notary stamp on the deed minutes, the difference in perception is the conflict of provisions between the UUJN and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.HT.03.10 of 2007.

The type of research contained in this research is empirical juridical. The data obtained based on literature and field research will then be analyzed qualitatively, and then poured with descriptive techniques.

The results of the research Ministerial regulations basically can only be revoked by equal or higher laws and regulations. If the replacement of the law does not automatically revoke the validity of the Ministerial Regulation which is the implementing regulation of the old law, then the Ministerial Regulation remains in effect. The affixing of the stamp/stamp of the deed minutes as an authentic deed product made by a Notary has legal force and applies as perfect evidence as stipulated in Article 1868 of the Civil Code where the deed is made by or before a public official and the deed is made in accordance with the form determined by law in this case UUJN and Permenkumham. The urgency of the seal/stamp of office on the Notary deed indicates that there is a party who must be responsible for the deed related to his position in this case is the Notary in terms of making and signing and affixing the seal/stamp of his office. Every Notary deed, whether in the form of deed minutes, deed copies, deed excerpts or deed grosses, must be affixed with a Notary stamp, because the urgency of the Notary stamp on a Notary deed is to strengthen and emphasize the Notary's signature in a deed. The affixing of the Notary's stamp on a Notarial deed is done to signify that the Notary is acting on behalf of his/her office and not on behalf of himself/herself.

Keywords: Stamp, Notary Position, deed minutes

³ Student of Master of Kenotariatan Study Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada